

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENDELEGASIAN WEWENANG PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) KEPADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATU

Identitas Penulis :
a. Nama : Cynthia Cindy Ayu Saputri
b. NIM : 115010107111050
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal : 05 Januari 2015

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Moh. Fadli SH., M.Hum.
NIP. 196504011990021001

Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH.
NIP. 197703052009122001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH., M.Hum.
NIP. 196008101986011002

HALAMAN PENGESAHAN

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENGADAAN KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) KEPADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATU**

Oleh :

**CYNTHIA CINDY AYU SAPUTRI
NIM. 115010107111050**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Anggota

Dr. Istislam, SH., M.Hum
NIP. 196208231986011002

Dr. Iwan Permadi, SH., M.Hum
NIP. 197201172002121002

Dr. Moh. Fadli, SH., M.Hum
NIP. 196504011990021001

Anggota

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Herlin Wijayati, SH., MH.
NIP. 196010201986012001

Lutfi Effendi, SH., M.Hum.
NIP. 196008101986011002

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Syafa'at, SH., M.Si.
NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan sembah sujud penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas ridhoNya, penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Tidak lupa, shalawat serta salam kepada Baginda Rasul, Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya, namun penulis berharap bahwa Skripsi ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis maupun bagi pembacanya.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S., selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang;
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
3. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
4. Bapak Dr. Moh. Fadli SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama penulisan Skripsi yang telah bersedia menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis;

5. Ibu Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Pendamping penulisan Skripsi yang telah memberikan nasehat serta arahnya selama penulis menyelesaikan Skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum terutama Dosen Konsentrasi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang atas ilmu yang sangat bermanfaat yang telah diberikan;
7. Bapak Drs. Maulidiono, M.Pd., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis;
8. Seluruh Staf Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu terutama kepada Bapak Kamim Utomo, S.Sos., selaku Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan dan Bapak Darmanto, SE., selaku Kepala Seksi Administrasi Pendaftaran Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, yang banyak memberikan sumbangan pikiran dan memberikan data untuk terwujudnya Skripsi ini;
9. Bapak Abdul Manaf dan Ibu Siti Sholikhah, kedua orangtuaku yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, doa, kepercayaan, nasehat, dorongan, dan bantuan yang tiada henti, motivator terbesar untuk penyelesaian skripsi ini;
10. Rexandi Rizkifan Munaf dan Muhammad Rifky Ivansyah Munaf, adik-adikku yang memberikan dukungannya dan selalu menghibur penulis dalam pembuatan Skripsi ini;
11. Anugrah Purwariza Augusta, kekasihku yang selalu memberikan semangat, doa, dorongan, perhatian, dan selalu sabar menemani suka dan duka penulis dalam penyelesaian Skripsi ini;

12. Sahabat-sahabat terbaikku Linda Vidya Meirina, Krisna Anggun Pratiwi, Sherly Nanda Ade Yoan Sagita, Achmad Aprianto, Irene Puspita Suryani, yang telah memberikan dukungan serta masukan dalam penyelesaian Skripsi ini;
13. Teman-teman angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
14. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan batuan dan dukungannya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pembuatan Skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Malang, 05 Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	x
Ringkasan	xi
<i>Summary</i>	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Sistematika Penulisan	12

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Kewenangan	14
1. Kewenangan dan Wewenang	14
2. Sumber-Sumber Wewenang Pemerintah	16
3. Segi-Segi Wewenang Pemerintah	22
4. Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan	26
B. Administrasi Kependudukan	27
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	27
2. Administrasi Kependudukan Sebagai Suatu Sistem	33
3. Sistem Administrasi Kependudukan (SIK)	34
C. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	36
1. Pengertian	36
2. <i>Electronic Government (E-Government)</i>	38
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	40
4. Penyelenggaraan KTP-el	40
D. Pemerintahan Daerah	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	48

C. Lokasi Penelitian	49
D. Jenis Data dan Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Populasi dan Sampel	53
G. Teknik Analisis Data	54
H. Definisi Operasional	55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
1. Gambaran Umum Kota Batu	56
2. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu	63
B. Bentuk Pendelegasian Wewenang Pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu	80
C. Akibat Dari Pendelegasian Wewenang Pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Batu	92
1. Akibat Dari Pendelegasian Wewenang Pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu	92
2. Akibat Dari Pendelegasian Wewenang Pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Bagi Pemerintah Kota Batu	97
3. Akibat Dari Pendelegasian Wewenang Pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Bagi Masyarakat Kota Batu	101

BAB V PENUTUP

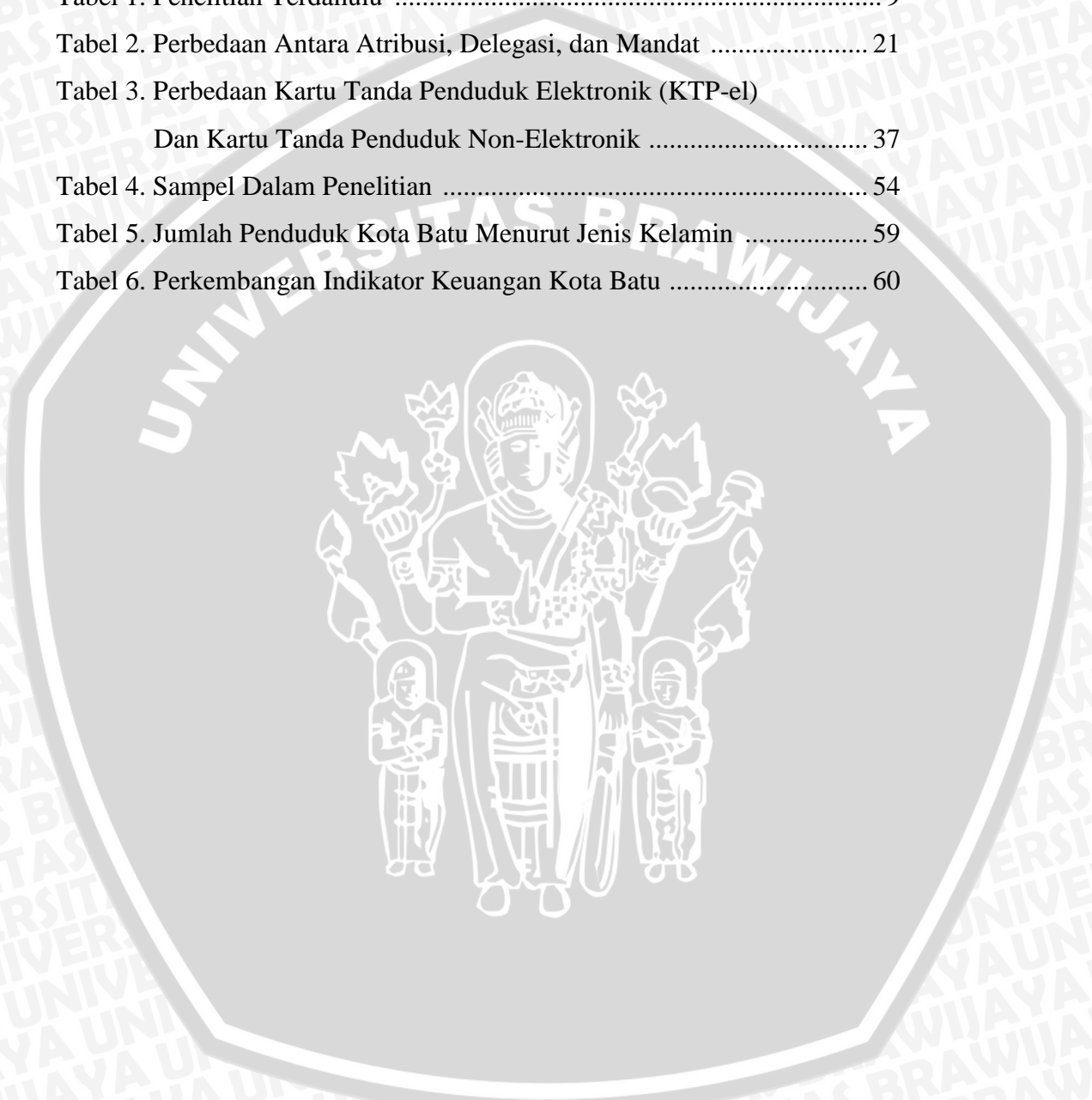
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

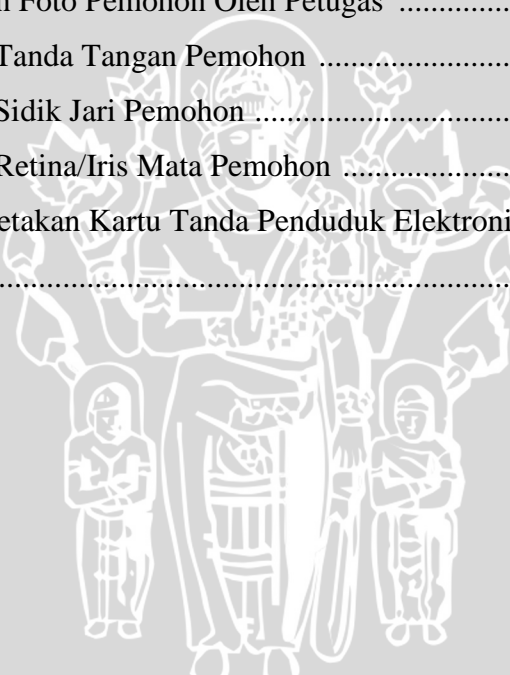
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2. Perbedaan Antara Atribusi, Delegasi, dan Mandat	21
Tabel 3. Perbedaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Dan Kartu Tanda Penduduk Non-Elektronik	37
Tabel 4. Sampel Dalam Penelitian	54
Tabel 5. Jumlah Penduduk Kota Batu Menurut Jenis Kelamin	59
Tabel 6. Perkembangan Indikator Keuangan Kota Batu	60



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu	65
Gambar 2. Alat Cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	85
Gambar 3. Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	86
Gambar 4. Card Reader/KTP-el Reader	87
Gambar 5. Pengambilan Foto Pemohon Oleh Petugas	93
Gambar 6. Perekaman Tanda Tangan Pemohon	94
Gambar 7. Perekaman Sidik Jari Pemohon	94
Gambar 8. Perekaman Retina/Iris Mata Pemohon	95
Gambar 9. Ruang Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	96



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	109
2. Kartu Bimbingan Skripsi	110
3. Surat Permohonan Ijin Pra-Penelitian dan Ijin Penelitian Dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu	111
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Pra-Penelitian dan Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu	113
5. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	115



RINGKASAN

Cynthia Cindy Ayu Saputri, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2015, PENDELEGASIAN WEWENANG PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) KEPADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATU, Dr. Moh. Fadli SH., M.Hum., Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH.

Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk mencetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) serta mengetahui dan mendeskripsikan akibat dari pendelegasian wewenang pengadaan KTP-el tersebut bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, Pemerintah Kota Batu dan bagi masyarakat Kota Batu.

Skripsi ini termasuk dalam penulisan hukum yuridis empiris. Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, Jalan Sultan Agung nomor 3A Batu, Jawa Timur. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi data yang diperoleh langsung dan sampel pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Sumber data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan, data arsip, data resmi dari lokasi penelitian, dan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta hasil penelusuran di internet. Teknik memperoleh data digunakan teknik observasi dan wawancara yang tidak terstruktur (*open interview*). Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa bentuk pelimpahan wewenang yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk mencetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) berasal dari peraturan perundang-undangan yang di dapat melalui cara delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh suatu organ pemerintahan yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pendelegasian ini adalah Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pendelegasian wewenang tersebut menimbulkan akibat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu sebagai penerima delegasi, bagi Pemerintah Kota Batu sebagai pemerintah daerah yang berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di daerah, serta bagi masyarakat Kota Batu yang dimudahkan dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk dengan adanya pendelegasian wewenang pengadaan KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

SUMMARY

Cynthia Cindy Ayu Saputri, State Administrative Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, February 2015, DELEGATION OF AUTHORITY OF PROCUREMENT OF ELECTRONIC RESIDENT CARD (KTP-el) TO THE DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL REGISTRY IN BATU CITY), Dr. Moh. Fadli SH., M.Hum., Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH.

Research in this thesis aims to identify and analyze the form of delegation of authority that granted by the Ministry of Internal Country Service to the Department of Population and Civil Registration in Batu to print the Electronic Identity Card (KTP-el) as well as knowing and result of the delegation of procurement authority of the KTP-el for the Department of Population and Civil Registration Batu, Batu City Government and the people of Batu City.

This thesis is included in the empirical juridical legal writing. The location of research in the Department of Population and Civil Registration Batu, Jalan Sultan Agung number 3A Batu, East Java. The data that used in this thesis are primary data and secondary data using primary data sources and secondary data sources. Primary data sources include data obtained directly and samples in the Department of Population and Civil Registration Batu. Secondary data source materials library, archive data, official data from the study site, and legal materials consisting of legislation relating to the problems and the search results on the Internet. Techniques used to obtain data observation and unstructured interviews (open interview). Data were analyzed using descriptive qualitative method.

Based on this research, it is known that the form of delegated authority that obtained by the Department of Population and Civil Registration Batu to print Electronic Identity Card (KTP-el) is derived from legislation by the way of delegation, the delegation of authority of the government by a government organization who has the authority to attributive to other organizations that based on legislation. Legislation that became the basic source of this delegation is Article 8 c of Law No. 24 of 2013 on the Amendment of Act No. 23 of 2006 concerning Population Administration. The consequences delegation of authority for the Department of Population and Civil Registration Batu as delegates, for the Batu City as local governments are obliged and responsible for organizing the administrative affairs of the population in the area, as well as for the people of the Batu city which facilitated with the management of Identity Card by the delegation of procurement authority KTP-el to the Department of Population and Civil Registration Batu.